

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Dalam dunia Pendidikan Islam , dengan adanya manajemen yang baik diharapkan ada perubahan kearah yang lebih baik khususnya yang menyangkut kwalitas dan Mutu Pendidikan Islam. Terkait dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam dalam Al Qur:an Surat Al-Ra'd : 11

..إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

Artinya : “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”(Al-Ra'd; 11)¹

¹Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1998), h.370

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa.

Hal ini berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Najm ayat 39 yang berbunyi:

﴿لَا يَخْلُقُ الْإِنسَانَ إِلَّا بِرَبِّهِ ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفِيرٌ ۝﴾

39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya, (QS. An-Najm ayat 39)

Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata dan diberdayakan, agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan, merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki perangkat guru, murid, kurikulum, dan sapras. Manajemen mengandung arti optimalisasi sumber-sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Persoalannya adalah pengelolaan dan pengendalian seperti apa yang kini dibutuhkan oleh sekolah?

Optimalisasi sumber-sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah disekolah. Hal itu

diperlukan suatu perubahan kebijakan dibidang manajemen pendidikan dengan prinsip memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masing-masing sekolah secara lokal. Dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya bukan persoalan yang sederhana. Perubahan kebijakan memerlukan kesiapan berbagai sumber daya dan kemampuan pengelola di tingkat sekolah. Namun yang lebih penting adalah pemahaman dan kesiapan pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana sistem baru dalam bentuk desentralisasi harus dilakukan oleh sekolah. Beberapa alasan pokok yang menuntut terjadinya perubahan kebijakan dalam pengelolaan sekolah, antara lain: tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang disebabkan adanya perubahan perkembangan kebijakan sosial politik, ekonomi, dan budaya.

Semakin tingginya kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah semakin meningkatkan tuntutan kebutuhankehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah.²

Manajemen sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek mesonya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.

Dalam kerangka inilah, manajemen sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. manajemen sekolah

² Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2004), Cet. Ke-1, h. 11

merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Depdikbud mengemukakan bahwa manajemen sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai para peserta didik. Otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum tentang pemberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (*line staf*), yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, yaitu guru dan kepala sekolah.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Penekanan aspek-aspek tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah. Misalnya krisis “ekonomi” yang melanda Indonesia saat ini, tidak dapat dihindari dampaknya terhadap pendidikan, terutama berkurangnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana

yang cukup untuk pendidikan dan menurunnya kemampuan sebagian orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya. Kondisi tersebut secara langsung berakibat pada menurunnya mutu pendidikan dan terganggunya proses pemerataan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, pemerintah akan terbantu baik dalam kontrol maupun pembiayaan sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada “masyarakat kurang mampu” yang semakin bertambah jumlahnya. Di samping itu, berkurangnya lapisan-lapisan birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi tersebut. Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan sekolah juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolahnya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.

Implementasi manajemen sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Dalam pada itu, dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran dibalik otonomi yang dimilikinya. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi anak yang mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.

Esensi manajemen sekolah terdapat tiga hal, yaitu : otonomi kelembagaan, fleksibilitas dalam berkreasi, serta partisipasi luas dalam pencapaian tujuan bersama. Esensi yang demikian dipandang sesuai untuk merespon paradigm baru pendidikan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Sisdiknas tahun 2003 bab III pasal 4 yang pada prinsipnya bahwa pendidikan nasional a) diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, b) sistem terbuka dan multi makna, c) proses pembudayaan dan pemberdayaan, d) memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas, e) budaya membaca menulis dan berhitung, f) memberdayakan peran serta masyarakat.³

Oleh karena itu untuk dapat mengimplementasikan manajemen sekolah, pola manajemen konvensional harus dirubah dari dimensi sentralistik menjadi desentralistik partisipatif, dari pendekatan birokratik menjadi pendekatan profesional, dari individual yang cerdas menjadi *team work* yang cerdas, dari organisasi hierarkis menjadi organisasi datar dan sebagainya. Selanjutnya dengan perubahan dimensional sikap dan perilaku organisasi tersebut dapat dibangun karakteristik kelembagaan yang kondusif secara utuh, baik dalam hal input, proses maupun outputnya.

Diasumsikan hingga saat ini pihak sekolah maupun masyarakat pada umumnya belum memahami prinsip-prinsip manajemen sekolah secara rinci, untuk itu dalam implementasinya perlu tahapan yang berkesinambungan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sikap dan cara pandang para birokrat perlu diubah dari

³ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Sisdiknas*, h. 7

pola intervensi menjadi fasilitasi, dan dari pendekatan control menjadi pendekatan support, sehingga dengan itu budaya kerja desentralistik partisipatif dapat benar-benar terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Adapun langkah-langkah dalam mengimplementasikan manajemen sekolah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tahap Pengenalan
- 2) Tahap Pemetaan
- 3) Tahap Penyusunan Rencana Kerja. Penyusunan rencana kerja harus dimulai dari membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Setiap sekolah harus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas
- 4) Tahap Evaluasi Awal
- 5) Tahap menentukan Kesiapan
- 6) Tahap Memilih Pemecahan Masalah
- 7) Tahap Membuat Skala Prioritas
- 8) Tahap Evaluasi Pelaksanaan
- 9) Tahap Merumuskan Sasaran Mutu Baru.⁴

manajemen sekolah memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah di Indonesia akan menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi sekolah secara sekaligus. Oleh karena

⁴ Erjati Abas, *Menuju Sekolah Mandiri*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 61

itu, perlu ada pentahapan pelaksanaan untuk menghindari terjadinya benturan-benturan antar aspek dan antar unit pelaksana. Untuk kepentingan tersebut sedikitnya perlu dilakukan tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.⁵

Manajemen sekolah memang bisa disebut suatu pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan, namun tidak berarti paradigma ini “baru” sama sekali, karena sebelumnya kita pernah memiliki inpres No. 10/1973. Sekolah-sekolah dikelola secara mikro dengan sepenuhnya diperankan oleh kepala sekolah dan guru-guru sebagai pengelola dan pelaksana pendidikan pada setiap sekolah yang juga tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakatnya. manajemen sekolah bermaksud “mengembalikan” sekolah kepada pemiliknya, yaitu masyarakat, yang diharapkan akan merasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.

Dengan manajemen sekolah, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah apalagi ketingkat pusat yang “jauh panggang dari pada api”.⁶

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-5, h. 3

⁶ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-3, h. 84

Lebih lanjut dijelaskan, manajemen sekolah menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para peserta didik. Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung *consensus* umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin, keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, mereka yang bertanggung jawab terhadap kebijakan, dan mereka yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut.⁷

Orang tua dan masyarakat pengguna lain memahami bahwa partisipasi sekolah dalam proses pendidikan anak-anak mereka menjadi sebuah keniscayaan. Adalah keniscayaan pula bagi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi agar lembaga persekolahan dapat beroperasi secara normal dalam mendidik anak-anaknya. Komitmen itu dapat dikatakan sebagai salah satu kunci keberhasilan implementasi manajemen sekolah. Jika sekolah-sekolah makin otonom dan secara signifikan dapat menunjukkan kinerjanya, masyarakat akan percaya kepada warga sekolah. Dengan kepercayaan itu pula peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah dengan jalan melembagakan manajemen sekolah. Sejalan dengan itu, Depdiknas melakukan prakarsa pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite

⁷ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-2, h. 196

Sekolah seperti diatur dalam Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 004/U/2002, tanggal 2 April 2002. Tujuannya antara lain adalah memwadahi peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu.⁸

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis di SMK MUHAMMADIYAH Pringsewu, implementasi Manajemen Sekolah cukup baik, seperti: 1) tahap pengenalan, 2) tahap pemetaan, 3) tahap penyusunan rencana kerja, 4) tahap evaluasi awal, 5) tahap menentukan kesiapan, 6) tahap memilih pemecahan masalah, 6) tahap membuat skala prioritas, 7) tahap evaluasi pelaksanaan, 8) tahap evaluasi pelaksanaan, 9) tahap merumuskan sasaran mutu baru.

Harapannya kedepan akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan mutu lulusan baik akademik maupun non akademiknya. Akan tetapi berdasarkan dokumen nilai semester ganjil 2013-2014 di SMK MUHAMMADIYAH Pringsewu mutu lulusan baik akademik maupun non akademiknya kurang memuaskan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mutu lulusan di SMK MUHAMMADIYAH Pringsewu pada tabel berikut ini :

⁸Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-3, h. 8

Tabel 1
Kompetensi Lulusan SMK MUHAMMADIYAH PRINGSEWU
Tahun 2013/2014

Kondisi Rata-rata nilai Ujian Nasional Tahun 2013/2014					
No	Mata Pelajaran	Kelas			
		XII KU	XII TN	XII RPL	XII TKR
1	Bahasa Inggris	60	62	68	66
2	Bahasa Indonesia	68	70	65	69
3	Matematika	65	64	65	64
4	Keuangan	69			
5	Tata Niaga		67		
6	RPL			70	
7	TKR				67

Sumber : Dokumentasi SMK Muhammadiyah Pringsewu

Jika dicermati nilai ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014, terlihat bahwa kompetensi lulusan nilai rata-rata seluruh mata pelajaran masih cukup rendah. Dengan demikian dapat dipahami walaupun implementasi manajemen sekolah di SMK Muhammadiyah Pringsewu cukup baik, namun belum meningkatkan mutu lulusan siswa dalam kompetensi lulusannya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Guru sudah mengadakan kerjasama yang baik dengan masyarakat terutama orang tua untuk meningkatkan mutu lulusan, akan tetapi mutu lulusan masih belum baik.
- b. Kepala sekolah dan guru sudah mengenalkan konsep manajemen sekolah, akan tetapi kurang meningkatkan mutu lulusan.
- c. Tahap pemetaan dalam implementasi fungsi manajemen sekolah sudah dijalankan akan tetapi belum mampu meningkatkan mutu lulusan.
- d. Dalam mengimplementasikan fungsi manajemen sekolah sudah menggunakan evaluasi awal dan evaluasi pelaksanaan akan tetapi mutu lultz belum baik.
- e. Tahap Penyusunan rencana kerja dalam implementasi manajemen sekolah sudah lengkap tapi belum mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- f. Dalam tahap membuat skala prioritas rencana yang dibuat sudah menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek mutu yang ingin dicapai akan tetapi belum dapat meningkatkan mutu lulusan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka peneliti memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang di batasi dalam konteks permasalahan.

Maka penelitian ini penulis fokuskan pada Implementasi Fungsi Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMK Muhammadiyah Pringsewu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dapat di buat dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Fungsi Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMK Muhammadiyah Pringsewu?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengungkap Implementasi Fungsi Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMK Muhammadiyah Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Memberikan informasi ilmiah tentang Fungsi Manajemen Sekolah. Informasi ini secara teoritis dapat dimanfaatkan oleh semua warga sekolah.

b. Secara Praktis

1. Bagi guru

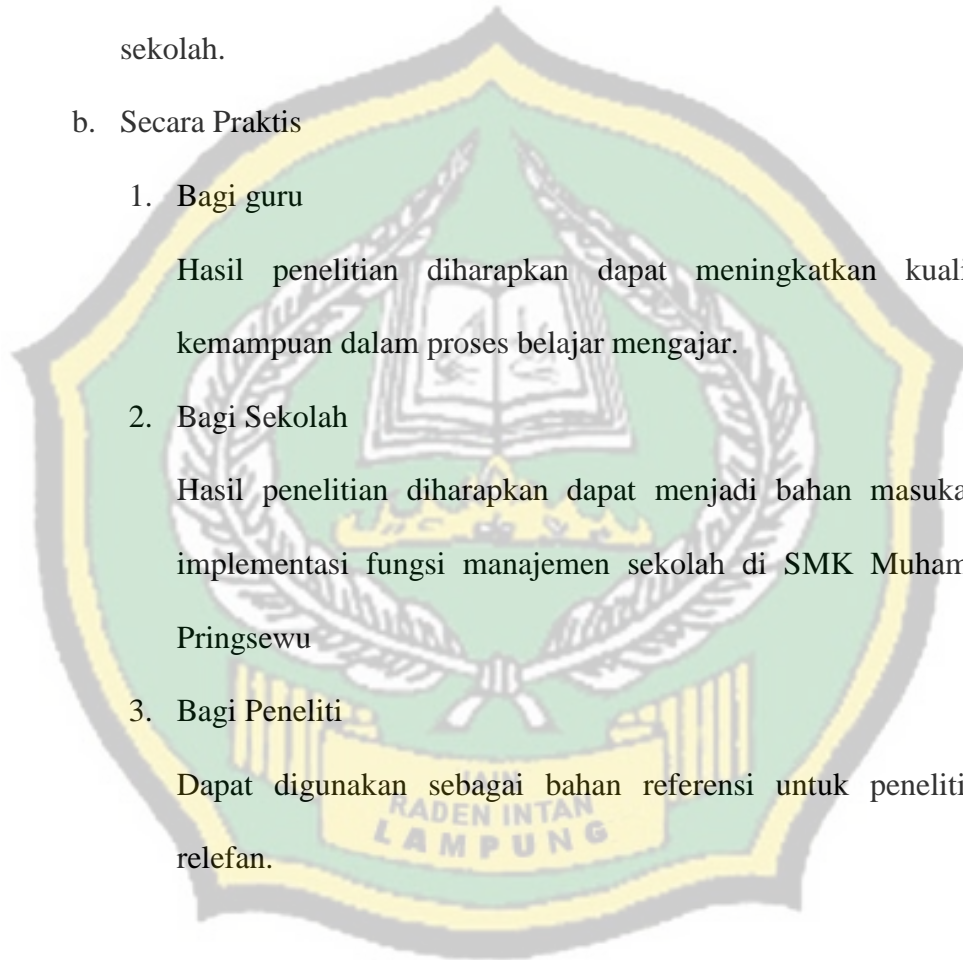
Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam proses belajar mengajar.

2. Bagi Sekolah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam implementasi fungsi manajemen sekolah di SMK Muhammadiyah Pringsewu

3. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang relevan.



E. Kerangka Pikir

Secara umum dapat diartikan sebagai pengkordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah (*stakeholders*) secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu dalam kerangka kebijakan nasional.⁹

Adapun langkah-langkah dalam mengimplementasikan Fungsi Manajemen Sekolah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tahap Pengenalan
- 2) Tahap Pemetaan
- 3) Tahap Penyusunan Rencana Kerja. Penyusunan rencana kerja harus dimulai dari membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Setiap sekolah harus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas
- 4) Tahap Evaluasi Awal
- 5) Tahap menentukan Kesiapan
- 6) Tahap Memilih Pemecahan Masalah
- 7) Tahap Membuat Skala Prioritas
- 8) Tahap Evaluasi Pelaksanaan
- 9) Tahap Merumuskan Sasaran Mutu Baru.¹⁰

Mutu adalah sebuah proses untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu memberikan kerangka kerja untuk berkelanjutan disekolah, untuk menghormati sesama dengan harapan yang tinggi bagi semua siswa, dan teknik-teknik untuk mencapai tujuan tersebut.”¹¹

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Hampir

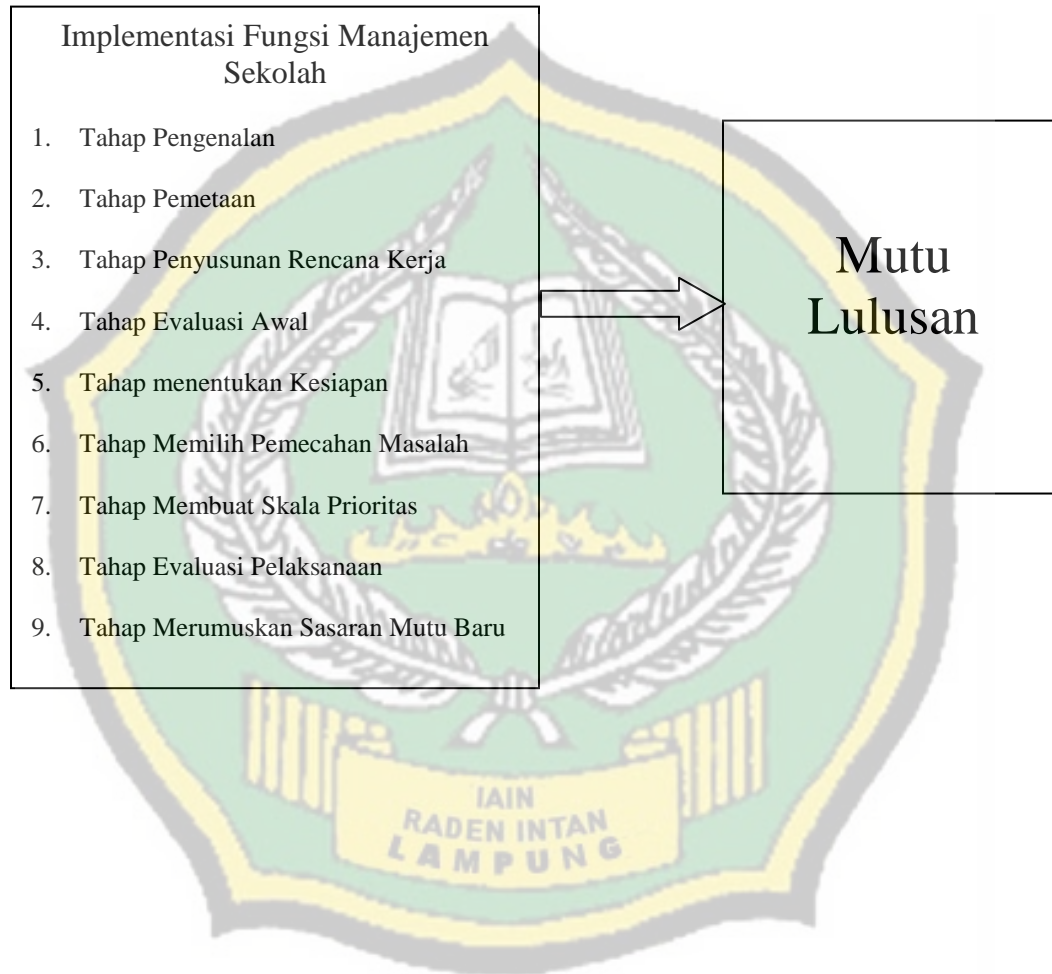
⁹Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep Dasar*, (Jakarta: Dikdasmen, 1990), h. 3

¹⁰Erjati Abas, *Menuju Sekolah Mandiri*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 61

¹¹Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: PT Revika Aditma, 2008), Cet. Ke-1, h. 52

semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara.¹²

Kerangka Pikir Penelitian



¹²Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) , h. 1

